



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 3c, Juli 2024

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 3c, Juli 2024

Pages: 1483-1488

Fenomena Politik Identitas dalam Kacamata Kritis Multikulturalisme di Indonesia

Muhammad Padjar Gemilang

Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Prof Dr.
Hamka Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka, Jakarta, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3c.1968>

How to Cite this Article

APA : Gemilang, M. P. (2024). FENOMENA POLITIK IDENTITAS DALAM KACAMATA KRITIS MULTIKULTURALISME DI INDONESIA. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3c), 1483 - 1488.
<https://doi.org/10.32672/mister.v1i3c.1968>

Others Visit : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Fenomena Politik Identitas dalam Kacamata Kritis Multikulturalisme di Indonesia

Muhammad Padjar Gemilang

Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka
Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka, Jakarta, Indonesia

*Email Korespondensi: muhammadpadjargemilang@gmail.com

Diterima: 10-07-2024

| Disetujui: 11-07-2024

| Diterbitkan: 12-07-2024

ABSTRACT

The phenomenon of identity politics which opposes the unity and integrity of Indonesian society is a form of denying the struggle for recognition of the diversity that exists in Indonesia. National unity and peace have been eroded due to identity political movements led by certain groups. Religion, ethnicity and gender are examples of identity politics that can complicate democracy. One of the positive aspects of identity politics is its potential to increase the political voice and involvement of underrepresented groups. However, this has the potential to increase political polarization and trigger conflict between factions. Identity politics has the potential to further divide society, cloud political discourse, and even inspire bigotry and prejudice. But identity politics, when used correctly, can also be a tool for democratizing social inclusion. The aim of writing this article is to analyze and criticize identity politics in multiculturalism theory. This theory explains the ways in which certain groups exploit identity politics to strengthen their authority, either by highlighting their own identities or erasing the identities of other groups. This research uses a library research strategy based on book analysis. The results obtained are how this theory criticizes the identity politics approach which limits the space for public discussion by focusing only on certain identities, thereby ignoring other issues, as well as excessive identity politics which can result in justice segmentation between various groups.

Keywords: Politics, Identity, Conflict, Multiculturalism

ABSTRAK

Fenomena politik identitas yang menentang persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia adalah bentuk menyangkal perjuangan pengakuan atas keberagaman yang ada di Indonesia. Persatuan dan perdamaian nasional terkikis akibat gerakan politik identitas yang dipimpin oleh kelompok tertentu. Agama, etnis, dan gender merupakan contoh politik identitas yang dapat mempersulit demokrasi. Salah satu aspek positif dari politik identitas adalah potensinya meningkatkan suara politik dan keterlibatan kelompok-kelompok yang kurang terwakili. Namun hal ini berpotensi meningkatkan polarisasi politik dan memicu konflik antar faksi. Politik identitas berpotensi semakin memecah belah masyarakat, mengaburkan wacana politik, dan bahkan menginspirasi kefanatikan dan prasangka. Namun politik identitas, bila digunakan dengan benar, juga dapat menjadi alat untuk mendemokratisasi inklusi sosial. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritik politik identitas dalam teori multikulturalisme. Teori ini menjelaskan cara-cara kelompok tertentu mengeksploitasi politik identitas untuk memperkuat otoritasnya, baik dengan menonjolkan identitasnya sendiri maupun menghapus identitas kelompok lain. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kepustakaan berdasarkan analisis buku. Hasil yang diperoleh adalah bagaimana teori ini mengkritisi pendekatan politik identitas yang membatasi ruang diskusi publik dengan memusatkan perhatian hanya pada identitas tertentu, sehingga mengabaikan persoalan lain, serta politik identitas berlebihan yang dapat mengakibatkan segmentasi keadilan antar berbagai kelompok.

Katakunci: Politik, Identitas, Konflik, Multikulturalisme

PENDAHULUAN

Sebenarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang cukup besar dibawah Negara Kesatuan. Kekayaan budaya di dalamnya, bukan luasnya wilayah yang dicakup, menentukan hal itu. Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beberapa negara dengan banyak kelompok identitas individu yang cukup berbeda. Tidak hanya negaranya yang beragam, Indonesia juga mempunyai banyak sekali pengelompokan identitas yang unik.

Jika hal ini termasuk dalam lingkup gerakan politik, identitas dipolitisasi melalui penafsiran radikal yang dimaksudkan untuk menarik mereka yang merasa “sama”, dalam hal ras, etnis, agama, atau faktor perekat lainnya. Proses demokrasi di Indonesia tidak bisa lepas dari orientasi terhadap identitas agama dan etnis. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa Politik Identitas di Indonesia telah hadir sejak lama. Politik identitas adalah politik yang penekanan utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan berdasarkan asumsi tentang tubuh fisik, politik etnis atau primordialisme, dan konflik agama, kepercayaan atau bahasa.

Politik identitas etnis berfungsi sebagai landasan untuk memperoleh kekuasaan dalam kontestasi demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan kata lain, politik identitas etnis dipolitisasi untuk tujuan politik; tujuannya adalah agar setiap orang mengambil keputusan berdasarkan identifikasi kesamaan etnis; Jadi, program- program yang dijalankan kandidat tidak menjadi acuan utama pemilih. Pemandangan seperti ini dalam kontestasi demokrasi sudah menjadi hal yang lumrah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa politik identitas etnis berhasil merebut kekuasaan politik di dunia nyata; Jadi, peran politik identitas etnis dinilai berhasil.

Komponen terpenting dalam kontestasi politik adalah etnisitas sebagai bahasa dalam membujuk masyarakat. Beberapa politisi mendapatkan otoritas dengan mengaku sebagai etnis. Dalam situasi seperti ini, komunikasi politik yang dilakukan oleh para pegawai negeri biasanya menekankan pada pengembangan cara pandang yang sama. Disadari atau tidak, fakta kontribusi etnis dalam politik telah tertanam kuat dalam setiap bidang tantangan demokrasi.

Dalam ilmu politik dan sosiologi, teori multikulturalisme adalah sebuah perspektif yang mengakui, menghargai, dan merangkul keragaman budaya, agama, etnis, dan bahasa dalam suatu masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendorong toleransi, rasa hormat, dan kerja sama di antara beberapa kelompok ini. Meskipun multikulturalisme bertujuan untuk memberikan kerangka inklusif untuk mengelola keragaman ini secara damai, politik identitas dapat menyebabkan konflik jika tidak dikendalikan dengan baik. Mengenai hak-hak universal yang berkaitan dengan hak-hak individu dan masyarakat yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan budayanya, multikulturalisme merupakan suatu pengakuan, penghormatan dan keadilan terhadap etnis minoritas.

Politik identitas, sebagaimana digunakan dalam teori multikulturalisme, adalah proses dimana identitas politik dan keterlibatan politik berkembang dari berbagai kelompok identitas budaya, etnis, agama, atau lainnya. Oleh karena itu, masyarakat dan kelompok memperjuangkan hak, kepentingan, dan keterwakilan politik dengan menggunakan identitas sebagai landasannya. Seseorang dapat berjuang untuk mendapatkan apresiasi terhadap keberagaman masyarakat melalui politik identitas, sehingga mendapatkan pengakuan. Misalnya, beberapa kelompok etnis atau agama mungkin mendorong undang-undang yang mengakui kebutuhan khusus mereka atau mencari pembelaan hukum terhadap diskriminasi dengan menggunakan politik identitas mereka.

Berdasarkan hal di atas, rumusan masalah diatas adalah bagaimana politik identitas tercermin dalam

teori multikulturalisme dan bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika sosial dan politik dalam masyarakat yang beragam, serta sejauh mana politik identitas memperkuat atau melemahkan kerangka multikulturalisme. dalam menciptakan masyarakat inklusif, sehingga mengarahkan perhatian. dan bagaimana, dalam kerangka multikulturalisme, politik identitas membentuk perkembangan identitas nasional.

METODE PENELITIAN

Menurut beberapa analis, proses ilmiah adalah proses yang diterapkan untuk memecahkan masalah penelitian. Dengan menerapkan teknik ilmiah, peneliti dapat mencari bahan kajian dari berbagai sumber-sumber terpercaya memudahkan penulis menyelesaikan penelitiannya, kali ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian ini, mengumpulkan data dari beberapa item penelitian yang selanjutnya dapat ditangani dengan baik. Penulis menerapkan pendekatan penelitian kepustakaan (library study) yaitu mencari informasi yang digunakan untuk penelitian.

Dengan menggunakan teknik penelitian perpustakaan, peneliti dapat menulis dan mengumpulkan data dari beberapa sumber dapat membantu seseorang untuk kemudian menjelaskan sehingga dapat ditemukan ide darinya untuk permasalahan kajian. Peneliti kemudian akan menggabungkan ide-ide dari masalah untuk menghasilkan solusi masalah berbasis penelitian secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan bisa dibagi ke dalam beberapa sub bahasan. Pemaparan hasil dan pembahasan harus memberikan deskripsi yang jelas dan tepat mengenai temuan penelitian, interpretasi penulis terhadap temuan tersebut, dan kesimpulan yang dapat ditarik.

Dalam kritis multikulturalisme, politik identitas juga dapat menimbulkan kesulitan. Politik yang mengarah pada etnisitas biasanya diterapkan dalam Diciptakan untuk memenangkan pertarungan, hal ini pada dasarnya digunakan oleh aktor-aktor lokal untuk memperoleh kekuasaan melalui identitas etnis dan berfungsi sebagai alat bagi aktor-aktor di bidang politik seperti. Politik identitas juga dapat menyebabkan perpecahan, terutama jika hal tersebut berkaitan dengan kepentingan pribadi atau agama; jadi, ini akan terasa lebih sensitif. Politik identitas sangatlah kejam dan tajam karena dapat membuat masyarakat terjerumus ke dalam jurang kebencian yang pada akhirnya akan menimbulkan berbagai dampak yang membahayakan persatuan dan kerukunan nasional.

Hal ini terutama terjadi di Indonesia terkait dengan permasalahan etnis, agama, dan ideologi serta pemain lokal yang termotivasi dalam pertumbuhan regional. Pemain lokal yang mengalami ketidakadilan menciptakan negosiasi politik dengan menggunakan berita sebagai senjata. Yang menjelaskan segalanya di setiap kesempatan. Namun, para pemain lokal dipandang hanya sebagai pemimpin yang mempunyai naluri untuk mencapai tujuan politik dan keuangan. Hal ini menjelaskan mengapa desentralisasi menjadi faktor penentu berkembangnya politik identitas dengan besarnya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah di era reformasi sehingga mendongkrak posisi aktor lokal yang mempunyai kekuasaan di kancah politik lokal. Aktivitas politik yang terdesentralisasi menawarkan berita mengenai suku, suku, agama, dan golongan sebagai politik dalam perolehan kekuasaan. Beberapa elemen mempengaruhi politik identitas: elemen struktural, dimensi politik primer, diskontinuitas politik dan etnis.

Politik Identitas di Indonesia dengan memanfaatkan isu SARA dapat menimbulkan perpecahan dan kekerasan. Masih kuatnya sikap kedaerahan, primordialisme, dan rendahnya toleransi perlu segera dibenahi agar negara ini tidak pecah belah. Permasalahan yang tidak dapat ditolerir ini tidak hanya terjadi pada agenda politik kelompok elite dalam penyelenggaraan negara, namun juga pada masyarakat pemilih. Terlalu mengumbar politik identitas akan berujung pada fasisme dan yang lebih mengerikan lagi yakni separatisme. Selain itu, mereka yang memiliki identitas tertentu dapat dieksploitasi untuk tujuan politik tertentu. Selanjutnya, hegemoni di dalam politik Indonesia yang fokus membangun negara mono-identitas, keberagaman identitas negara ini lambat laun akan hilang.

1) Terciptanya Politik Identitas

Jika tidak ada ruang bagi keberagaman, maka evolusi metode politik berbasis identitas dengan sendirinya tidak dapat dihentikan. Di sisi lain, membiarkan variasi tumbuh dalam kebijakan politik baru akan mengkompromikan nilai-nilai fundamental yang dipertahankan dalam demokrasi dan hak asasi manusia, sejalan dengan masyarakat sosial yang beradab. Secara global, multikulturalisme terancam dalam berbagai cara. Persoalan umum yang masih ada adalah pluralisme dan toleransi masalah. Semua itu diakibatkan penerapan politik identitas yang terlalu berat.

Ada tiga cara untuk menciptakan identitas dalam berpolitik secara umum:

1. Primordialisme, lebih tepatnya pengetahuan bahwa identitas diperoleh baik secara organik maupun turun-temurun. Orang Batak konon mempunyai sifat yang kasar dan suka riuh. Pandangan ini gugur padahal tidak semua orang Batak mempunyai sifat akhlak.
2. Menurut konstruktivisme, identitas dihasilkan dan merupakan hasil dari proses sosial yang rumit. Keterkaitan budaya dalam masyarakat membantu seseorang mengembangkan identitasnya. Pola ikatan yang mengawali perkembangan identitas bisa berupa klan atau keluarga.
3. Instrumentalisme, yaitu identitas merupakan sesuatu yang diciptakan untuk kepentingan elite dan lebih memperhatikan aspek kekuasaan (Alim,2019)

Pengelolaan global atas identitas etnis dan budaya yang berbeda bergantung pada kesadaran akan keberagaman. Oleh karena itu, Indonesia mengikuti pola sebaliknya, yang sebenarnya akurat. Setiap orang mempunyai kemampuan mengungkapkan pikiran dan ekspresi; namun demikian, kebebasan ini harus dipertanggungjawabkan karena globalisasi menimbulkan kecenderungan menuju monokulturalisme yang sebagian besar dimotivasi oleh proses dan praktik material-rasional yang didorong oleh ekonomi pasar global. Meskipun Teknologi informasi nampaknya secara aktif mendorong interaksi budaya antar generasi milenial, termasuk melalui peminjaman ide dan agak mengubah standar, yang sebenarnya terjadi tak lebih dari upaya untuk menegaskan budaya dominan atas yang lain.

2) Multikulturalisme Dalam Politik Identitas

Dalam perspektif ini, interaksi interaktif antar kelompok terutama yang melibatkan berbagai suku harus mewujudkan kerangka etika, yang dalam hal ini sikap toleran akan terwujud. Hanya dalam lingkungan politik demokrasi toleransi politik bisa ada. Toleransi politik yakni toleransi politik banyak dipengaruhi oleh sistem, struktur, dan lingkungan politik yang berlaku. Unsur-unsur lainnya antara lain tingkat kesejahteraan ekonomi, struktur dan sistem politik, serta psikologi politik yang membentuk hal tersebut. Dalam disiplin psikologi komunikasi, penguasaan dan pembelajaran dimaknai berbeda. Ide

politik membantu seseorang untuk memahami pola komunikasi yang ada dalam interaksi antar manusia dan relevan dalam penerapannya. Setidaknya hal ini menjadi perdebatan mengingat peta politik masa depan yang berkembang dalam orientasi politik yang beragam, lebih melihat ke belakang pada tataran kemanusiaan dan etika. Salah satu ilmuwan politik, Geoff Mulgan, berpendapat bahwa moralitas dan peran perang etis harus mendapat prioritas utama karena hubungan antarmanusia tumbuh melalui saluran komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi manusia tidak hanya mencakup proses penggunaan kata-kata dan nada suara tetapi juga postur dan emosi wajah. Orang-orang merangkul dan menunjukkan kedua cara komunikasi tersebut.

3) Politik Identitas Di Indonesia

Penelitian terkait politik identitas, Indonesia kemudian dipandang sedang mengalami kemungkinan konflik dalam hubungan antara agama dan negara. Kelas politik di Indonesia menganggap politik identitas menarik, khususnya dalam kaitannya dengan agama, sebagai alat yang berguna untuk memenangkan suara. Keterlibatan politik memang dipengaruhi oleh agama. Politik identitas memang diperbolehkan dalam negara demokrasi, namun jika digunakan secara berlebihan akan menimbulkan dampak negatif, terutama di Indonesia yang masyarakatnya beragam baik dari segi agama, warna kulit, dan etnis. Oleh karena itu, perlu dihadirkan narasi yang inklusif bahwa negara tidak bertentangan dengan agama dan justru merupakan tugas negara untuk melindungi kebebasan beragama, negara memfasilitasi warga negaranya untuk dapat beribadah sesuai tuntutan agama, bahkan dalam peraturan dan sistem, hanya sedikit peraturan yang diadopsi. Karena politik identitas dikaitkan dengan kepentingan politik bahkan persoalan ideologi, maka pada akhirnya menjadi fenomena yang cukup pelik. Strategi multikulturalisme kosmopolitan memungkinkan seseorang mengatasi politik identitas dengan membiarkan terciptanya masyarakat kosmopolitan yang kurang fokus pada identitas. Kami bertujuan untuk menghilangkan hambatan budaya dalam masyarakat ini sehingga setiap anggota atau kelompok bebas dari satu budaya. Pendukung utama dalam menarik dan bereksperimen dengan informasi intelektual serta dalam secara bebas membangun kehidupan budaya mereka sendiri adalah kebebasan.

KESIMPULAN

Untuk mengatasi fenomena identitas politik yang ada dalam kehidupan demokrasi di Pemerintahan Indonesia, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI serta Pimpinan Partai Politik harus bekerjasama lebih sinergis dalam meningkatkan pendidikan politik khususnya dari segi literasi politik dan literasi digital, sehingga meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis di masyarakat. Pemerintah kemudian harus menetapkan secara jelas pedoman beserta hukuman yang tegas terhadap penyebaran konten politik identitas yang menggunakan kepentingan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam pemilu di semua tingkatan, baik secara lisan, tertulis, atau melalui media lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Sahirul. "Islam , Multikulturalisme , Dan Pancasila" 23, no. 2 (2019): 85–99.
Muthohirin, N. (2019). Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural. J-PAI: Jurnal

- Pendidikan Agama Islam, 6(1).
- Nego, O. (2020). Teologi Multikultural Sebagai Respon Terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas Di Indonesia. *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 16(2), 121-139.
- Dulmanan, A. A. (2020). Multikulturalisme dan Politik Identitas: Catatan Reflektif atas Gagasan Politik Will Kymlicka. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 1(1), 31-42.
- Soenjoto, W. P. P. (2019). Eksploitasi isu politik identitas terhadap identitas politik pada generasi milineal indonesia di era 4.0. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 187-217.